

**HUBUNGAN ANTARA PARTISIPASI KOMITE SEKOLAH
DENGAN PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN KEPANJEN
KABUPATEN MALANG**

*Relationship Between Participation of School Committee
with Fulfillment of the Minimum Service Standards of Elementary School
in Kepanjen Malang District*

**Delita Pristyowati
Agus Timan
Djum Djum Noor Benty**

e-mail: delita.09pristy@gmail.com

**Jurusan Administrasi Pendidikan FIP Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang Nomor 5 Malang**

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan mengetahui hubungan antara partisipasi komite sekolah dalam memberikan pertimbangan, dukungan, pengawasan, dan mediasi dengan pemenuhan standar pelayanan minimal sekolah dasar. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan korelasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara partisipasi komite sekolah dalam memberikan pertimbangan, dukungan, pengawasan, dan mediasi dengan pemenuhan standar pelayanan minimal sekolah dasar.

Kata kunci: partisipasi komite sekolah, pemenuhan standar pelayanan minimal sekolah dasar

Abstract: The purpose of this study is to describe and to know the relationship between the school committee's participation in advisory, supporting, controlling and mediator with the fulfillment of minimum service standards of elementary school. Sampling technique using purposive sampling. Data collection techniques used questionnaires and analyzed by using descriptive and correlational analysis. The results show that there is a significant relationship between the school committee's participation in advisory, supporting, controlling and mediator with the fulfillment of minimum service standards of elementary school.

Keyword: School committee participation, fulfillment of the minimum service standards of elementary school.

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang telah diamandemen mengamanatkan, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini mengandung makna bahwa negara berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang baik kepada warganya.

Permasalahan yang muncul menurut Kompas (2011), bahwa “berdasarkan data yang ada hingga September 2011 sebanyak 40,31% dari 201.557 sekolah di Indonesia di bawah Standar Pelayanan Minimal (SPM)”. Sedangkan *Cable News Network* (CNN) Indonesia (2015) menyatakan, bahwa “penerapan standar pelayanan minimal pendidikan masih kacau”.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) menurut *United States Agency International Development* (2014:53) adalah “ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal yang telah ditetapkan melalui peraturan perundangan pemerintah”. Terdapat 13 indikator SPM pendidikan dasar yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Pasal 2 Ayat 2 Bagian b mulai dari ketersediaan buku, alat peraga, ruang kelas, guru, supervisi, hingga penerapan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Pencapaian SPM oleh satuan pendidikan tidak dapat terlepas dari peran serta masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena masyarakat mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kerjasama yang efektif antara pemerintah, warga sekolah dan peran serta masyarakat yang diwadahi dalam komite sekolah mutlak dibutuhkan untuk mencapai SPM sesuai target. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses analisis, perencanaan, pengawasan dan evaluasi. Melibatkan masyarakat dalam program-program pendidikan akan menjamin terlaksananya program-program tersebut secara transparan, akuntabel dan perbaikan secara terus-menerus.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana hubungan antara partisipasi komite sekolah dalam memberikan pertimbangan, dukungan, pengawasan dan mediasi dengan pemenuhan standar pelayanan minimal sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan penelitian deskriptif korelasional. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini digunakan dua teknik analisis data, yaitu 1) teknik analisis deskriptif, digunakan untuk mendeskripsikan tingkat partisipasi komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dalam memberikan pertimbangan, dukungan, pengawasan, dan mediasi; 2) teknik analisis korelasional, digunakan untuk mengetahui hubungan antara partisipasi komite sekolah dalam memberikan pertimbangan, dukungan, pengawasan, dan mediasi dengan pemenuhan standar pelayanan minimal sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Pengolahan datanya menggunakan komputer dengan program *SPSS for windows release 20.00* dan *Microsof Excel*.

Populasi dalam penelitian ini adalah komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Mengingat jumlahnya cukup besar, maka diadakan pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sehingga jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu berjumlah 47 orang ketua komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Untuk mengolah data penelitian, menggunakan teknik kuesioner secara tertutup. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan berdasarkan variabel penelitian. Untuk memantapkan instrumen, dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan menggunakan 2 teknik, yaitu uji *expert judgement* dan uji coba ke lapangan. Hasil uji coba ke lapangan yang dilakukan kepada 30 orang responden komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, menunjukkan bahwa dari 87 butir pernyataan yang terdiri dari 63 butir pernyataan tentang partisipasi komite sekolah dan 24 butir pernyataan tentang standar pelayanan minimal diketahui bahwa jumlah pernyataan yang tidak valid sebanyak 2 butir, sedangkan pernyataan yang dinyatakan valid sebanyak 85 butir. Sedangkan uji reliabilitas diperoleh hasil reliabilitas instrumen sebesar 0,975. Sehingga apabila dilihat pada kriteria atau kategori koefisien reliabilitas termasuk dalam kriteria keenam yaitu tepat untuk riset.

HASIL

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Partisipasi Komite Sekolah dalam Memberikan Pertimbangan

No	Kelas Interval	Kriteria	Frekuensi	Persentase (%)
1.	56-68	Sangat Tinggi	23	48,9%
2.	43-55	Tinggi	16	34,0%
3.	30-42	Cukup	6	12,8%
4.	17-29	Rendah	2	4,3%
Jumlah			47	100%

Partisipasi komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dalam memberikan pertimbangan diketahui bahwa dari 47 orang responden yang merupakan komite sekolah diperoleh hasil 23 responden dalam kategori sangat tinggi, 16 orang dalam kategori tinggi, 6 responden dalam kategori cukup, 2 responden dalam kategori rendah. Sementara itu untuk nilai *mean* dari partisipasi komite sekolah dalam memberikan pertimbangan adalah 53,60. Jika *mean* jawaban responden menunjukkan angka 53,60 berada pada interval 43-55, berarti responden komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dalam memberikan pertimbangan adalah tinggi.

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Partisipasi Komite Sekolah dalam Memberikan Dukungan

No	Kelas Interval	Kriteria	Frekuensi	Persentase (%)
1.	39-48	Sangat Tinggi	19	40,4%
2.	30-38	Tinggi	16	34,0%
3.	21-29	Cukup	10	21,3%
4.	12-20	Rendah	2	4,3%
Jumlah			47	100%

Partisipasi komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dalam memberikan dukungan diketahui bahwa dari 47 orang responden yang merupakan komite sekolah diperoleh hasil 19 responden dalam kategori sangat tinggi, 16 responden dalam kategori tinggi, 10 responden dalam kategori cukup, 2 responden dalam kategori rendah. Sementara itu untuk nilai *mean* dari partisipasi komite sekolah dalam memberikan dukungan adalah 34,43. Jika *mean* jawaban responden menunjukkan angka 34,43 berada pada interval 30-38, berarti responden komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dalam memberikan dukungan adalah tinggi.

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Partisipasi Komite Sekolah dalam Memberikan Pengawasan

No	Kelas Interval		Frekuensi	Persentase (%)
1.	65-80	Sangat Tinggi	18	38,3%
2.	50-64	Tinggi	17	36,2%
3.	35-49	Cukup	7	14,9%
4.	20-34	Rendah	5	10,6%
Jumlah			47	100%

Partisipasi komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dalam memberikan pengawasan diketahui bahwa dari 47 orang responden yang merupakan komite sekolah diperoleh hasil 18 responden dalam kategori sangat tinggi, 17 responden dalam kategori tinggi, 7 responden dalam kategori cukup, 5 responden dalam kategori rendah. Sementara itu untuk nilai *mean* dari partisipasi komite sekolah dalam memberikan pengawasan adalah 57,47. Jika *mean* jawaban responden menunjukkan angka 57,47 berada pada interval 50-64, berarti responden komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dalam memberikan pengawasan adalah tinggi.

Tabel 4 Distribusi Frekuensi Partisipasi Komite Sekolah dalam Memberikan Mediasi

No	Kelas Interval		Frekuensi	Persentase (%)
1.	47-56	Sangat Tinggi	24	51,1%
2.	36-46	Tinggi	12	25,5%
3.	25-35	Cukup	11	23,4%
4.	14-24	Rendah	0	0%
Jumlah			47	100%

Partisipasi komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dalam memberikan mediasi diketahui bahwa dari 47 orang responden yang merupakan komite sekolah diperoleh hasil 24 responden dalam kategori sangat tinggi, 12 responden dalam kategori tinggi, 11 responden dalam kategori cukup, 0 responden dalam kategori rendah. Sementara itu untuk nilai *mean* dari partisipasi komite sekolah dalam memberikan mediasi adalah 44,96. Jika *mean* jawaban responden menunjukkan angka 44,96 berada pada interval 36-46, berarti responden komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dalam memberikan mediasi adalah tinggi.

Pengujian Hipotesis 1

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai korelasi antara partisipasi komite sekolah dalam memberikan pertimbangan (X_1) dengan pemenuhan standar pelayanan minimal sekolah dasar (Y) adalah 0,990 dan signifikansinya = 0,000. Jika $\text{sig } 0,000 < \alpha 0,05$ maka, kriteria pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_1 . Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan antara partisipasi komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dengan pemenuhan standar pelayanan minimal sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Pengujian Hipotesis 2

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai korelasi antara partisipasi komite sekolah dalam memberikan dukungan (X_2) dengan pemenuhan standar pelayanan minimal sekolah dasar (Y) adalah 0,989 dan signifikansinya = 0,000. Jika $\text{sig } 0,000 < \alpha 0,05$ maka, kriteria pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_1 . Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan antara partisipasi komite sekolah dalam memberikan dukungan dengan pemenuhan standar pelayanan minimal sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Pengujian Hipotesis 3

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai korelasi antara partisipasi komite sekolah dalam memberikan pengawasan (X_3) dengan pemenuhan standar pelayanan minimal sekolah dasar (Y) adalah 0,990 dan signifikansinya = 0,000. Jika $\text{sig } 0,000 < \alpha 0,05$ maka, kriteria pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_1 . Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan antara partisipasi komite sekolah dalam memberikan pengawasan dengan pemenuhan standar pelayanan minimal sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Pengujian Hipotesis 4

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai korelasi antara partisipasi komite sekolah dalam memberikan mediasi (X_4) dengan pemenuhan standar pelayanan minimal sekolah dasar (Y) adalah 0,990 dan signifikansinya = 0,000. Jika $\text{sig } 0,000 < \alpha 0,05$ maka, kriteria pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_1 . Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan antara partisipasi komite sekolah dalam memberikan mediasi dengan pemenuhan standar pelayanan minimal sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Pengujian Hipotesis 5

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai korelasi antara partisipasi komite sekolah dalam memberikan pertimbangan (X_1), partisipasi komite sekolah dalam memberikan dukungan (X_2), partisipasi komite sekolah dalam memberikan pengawasan (X_3), partisipasi komite sekolah dalam memberikan mediasi (X_4) dengan pemenuhan standar pelayanan minimal sekolah dasar (Y) adalah 0,746 dan signifikansinya = 0,000. Jika $\text{sig } 0,000 < \alpha 0,05$ maka, kriteria pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_1 . Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan antara partisipasi komite sekolah dalam memberikan pertimbangan, partisipasi komite sekolah dalam memberikan dukungan, partisipasi komite sekolah dalam memberikan pengawasan, partisipasi komite sekolah dalam memberikan mediasi dengan pemenuhan standar pelayanan minimal sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

PEMBAHASAN

Partisipasi Komite Sekolah dalam Memberikan Pertimbangan

Partisipasi komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dalam memberikan pertimbangan diwujudkan dengan kontribusinya dalam memberikan ide dan masukan dalam proses perencanaan, serta bersama-sama bertanggungjawab dalam pelaksanaan *member of control* terhadap suatu program sekolah. Sebagai badan pertimbangan, komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang bertugas untuk memberikan

pertimbangan terhadap proses penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) bersama dengan kepala sekolah, pelaksanaan program kurikulum, dan pengelolaan sumber daya pendidikan. Menurut Depdiknas (2003:21) “komite sekolah sebagai badan pertimbangan mempunyai tiga fungsi yaitu memberikan pertimbangan dalam perencanaan sekolah, pelaksanaan program pendidikan, dan pengelolaan sumber daya pendidikan”. Berdasarkan tiga fungsi tersebut partisipasi komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang sebagai badan pertimbangan telah menjalankan tugas dan fungsinya yaitu dalam hal perencanaan, komite sekolah ikut berkontribusi dalam penyusunan RKAS, pelaksanaan program kurikulum dan pengelolaan sumber daya sekolah.

Partisipasi Komite Sekolah dalam Memberikan Dukungan

Komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dalam memberikan dukungan diwujudkan dalam bentuk dana dan non dana. Dukungan yang bersifat dana berupa sumbangan sukarela terhadap kegiatan di sekolah seperti membantu sekolah dalam penggalangan dana untuk kegiatan yang bersifat sosial. Sementara sumbangsih komite sekolah dalam bentuk non dana juga diberikan dalam bentuk memberikan ide-ide atau pemikiran-pemikiran terhadap pengelolaan sumber daya, pengelolaan sarana dan prasarana, dan pengelolaan anggaran untuk kemajuan sekolah. Menurut Depdiknas (2003:25) “komite sekolah sebagai badan pendukung mempunyai tiga fungsi yaitu memberikan dukungan dalam pengelolaan sumber daya sekolah, pengelolaan sarana dan prasarana sekolah, dan pengelolaan anggaran sekolah”. Berdasarkan pendapat tersebut, komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dalam memberikan dukungan menjalankan tugas dan fungsinya dalam bentuk pikiran, materi, maupun tenaga baik dalam pengelolaan sumber daya sekolah, sarana dan prasarana, dan pengelolaan anggaran sekolah.

Partisipasi Komite Sekolah dalam Memberikan Pengawasan

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berupa kehadiran komite sekolah dalam rapat penyusunan RKAS, karena dengan keikutsertaan komite sekolah

dalam penyusunan RKAS maka selain bisa membantu untuk memberikan masukan-masukan terkait penyusunan RKAS juga sekaligus mengawasi jalannya penyusunan RKAS. Depdiknas (2003:31) menyatakan bahwa “komite sekolah sebagai badan pengawasan mempunyai tiga fungsi yaitu mengontrol perencanaan pendidikan di sekolah, memantau pelaksanaan program sekolah, dan memantau *output* pendidikan”. Berdasarkan pendapat tersebut komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang sebagai badan pengawasan melaksanakan fungsinya dalam mengontrol perencanaan dan pelaksanaan RKAS, sedangkan fungsi untuk memantau *output* pendidikan belum dijalankan oleh komite sekolah.

Partisipasi Komite Sekolah dalam Memberikan Mediasi

Bentuk partisipasi komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dalam memberikan mediasi yaitu dibuktikan dengan kegiatan pada setiap awal semester komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang mengadakan pertemuan dengan pihak orang tua wali murid, hal ini dilakukan untuk menampung masukan-masukan dari orang tua wali murid, untuk nantinya disampaikan kepada kepala sekolah. Depdiknas (2003:35) “komite sekolah sebagai badan penghubung mempunyai tiga fungsi yaitu menjadi penghubung antara masyarakat dengan sekolah dalam perencanaan pendidikan, pelaksanaan program sekolah, dan pengelolaan sumber daya pendidikan”. Hal ini berarti komite sekolah di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang sebagai badan mediasi membantu pertemuan antara wali siswa dengan guru dan mengadakan pertemuan rutin setiap bulan dengan semua anggota komite sekolah untuk berkontribusi terhadap peningkatan prestasi belajar siswa dan kinerja sekolah.

Hubungan antara Partisipasi Komite Sekolah dalam Memberikan Pertimbangan dengan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sekolah Dasar

Komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dalam memberikan pertimbangan diwujudkan dengan kontribusinya dalam memberikan ide dan masukan dalam proses perencanaan, serta bersama-sama bertanggungjawab dalam pelaksanaan *member of control* terhadap suatu program

sekolah. Sebagai badan pertimbangan, komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang bertugas untuk memberikan pertimbangan terhadap proses penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) bersama dengan kepala sekolah, pelaksanaan program kurikulum, dan pengelolaan sumber daya pendidikan. Komite sekolah sebagai badan pertimbangan diperlukan untuk mencapai standar pelayanan minimal sekolah dasar di Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh *United States Agency International Development* (2014:23) strategi program perencanaan standar pelayanan minimal sekolah dasar di kabupaten/kota yaitu dengan penguatan organisasi masyarakat sipil maksudnya adalah “pemerintah kabupaten membuka ruang organisasi masyarakat sipil dengan melibatkan mereka dalam analisis, perencanaan, pengawasan dan evaluasi”. Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolah diperlukan untuk mencapai standar pelayanan minimal sekolah dasar di kabupaten/kota.

Hubungan antara Partisipasi Komite Sekolah dalam Memberikan Dukungan dengan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sekolah Dasar

Komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dalam memberikan dukungan diwujudkan dalam bentuk sumbangan sukarela terhadap kegiatan di sekolah seperti membantu sekolah dalam penggalangan dana untuk kegiatan yang bersifat sosial. Sementara sumbangsih komite sekolah dalam bentuk non dana juga diberikan dalam bentuk memberikan ide-ide atau pemikiran-pemikiran terhadap pengelolaan sumber daya, pengelolaan sarana dan prasarana, dan pengelolaan anggaran untuk kemajuan sekolah. Komite sekolah sebagai badan pemberi dukungan dibutuhkan untuk mencapai standar pelayanan minimal sekolah dasar di kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan pendapat dari *United States Agency International Development* (2014:24) yang menyatakan bahwa “hasil-hasil penerapan program standar pelayanan minimal sekolah dasar di kabupaten/kota adalah partisipasi orangtua dan masyarakat dalam pembangunan fasilitas sekolah”. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi komite sekolah dalam memberikan dukungan diperlukan dalam mencapai standar

pelayanan minimal sekolah dasar di kabupaten/kota baik dalam bentuk biaya, pikiran maupun tenaga terhadap pembangunan fasilitas sekolah.

Hubungan antara Partisipasi Komite Sekolah dalam Memberikan Pengawasan dengan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sekolah Dasar

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berupa kehadiran komite sekolah dalam rapat penyusunan RKAS, karena dengan keikutsertaan komite sekolah dalam penyusunan RKAS maka selain bisa membantu untuk memberikan masukan-masukan terkait penyusunan RKAS juga sekaligus mengawasi jalannya penyusunan RKAS. *United States Agency International Development* (2014:8) menyatakan bahwa untuk meningkatkan strategi pemenuhan standar pelayanan minimal sekolah dasar di kabupaten/kota perlu “melibatkan masyarakat untuk mengawasi penyediaan layanan publik melalui mekanisme penanganan pengaduan dan janji perbaikan”. Komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang sebagai badan pengawasan melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan minimal melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Sehingga, peran komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang sebagai badan pengawasan diperlukan untuk mengawasi dan melakukan kontrol terhadap satuan pendidikan dalam upaya pencapaian standar pelayanan minimal baik dalam hal kurikulum sekolah, peserta didik, ketenagaan, sarana prasarana sekolah, organisasi, pembiayaan, manajemen sekolah dan peran serta masyarakat. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah adalah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

Hubungan antara Partisipasi Komite Sekolah dalam Memberikan Mediasi dengan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sekolah Dasar

Bentuk partisipasi komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dalam memberikan mediasi dibuktikan dengan kegiatan pada setiap awal semester komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang mengadakan pertemuan dengan pihak orang tua wali murid, hal ini

dilakukan untuk menampung masukan-masukan dari orang tua wali murid, untuk nantinya disampaikan kepada kepala sekolah. Peran komite sekolah sebagai badan mediasi dibutuhkan untuk mencapai standar pelayanan minimal sekolah dasar. Menurut *United States Agency International Development* (2014:23) menyatakan bahwa untuk membantu ketercapaian standar pelayanan minimal sekolah dasar di kabupaten/kota perlu melakukan penguatan organisasi masyarakat sipil yaitu “instansi pemerintah dan masyarakat sipil bekerja bersama-sama, berdialog, berdiskusi untuk mencari solusi terbaik dan melakukan pertemuan rutin untuk berdialog diantara pemangku kepentingan”. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa untuk membantu pencapaian standar pelayanan minimal sekolah dasar di kabupaten/kota perlu dilakukan mediasi diantara para pemangku kepentingannya. Sehingga jelas bahwa komite sekolah sebagai badan mediasi dibutuhkan untuk mencapai standar pelayanan minimal sekolah dasar di kabupaten/kota.

Hubungan Antara Partisipasi Komite Sekolah dalam Memberikan Pertimbangan, Dukungan, Pengawasan, dan Mediasi dengan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sekolah Dasar

Peluang masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pendidikan setelah adanya penerapan MBS diwadahi dalam komite sekolah, sehingga semua kebijakan operasional sekolah di setiap satuan pendidikan harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan komite sekolah. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah menyatakan bahwa keberadaan komite sekolah memiliki peran sebagai “badan pemberi pertimbangan (*Advisory Agency*), badan pemberi dukungan (*Supporting Agency*), badan pemberi pengawasan (*Controlling Agency*), dan badan pemberi mediasi (*Mediator Agency*)”.

United States Agency International Development (2014:11) menjelaskan bahwa untuk mencapai standar pelayanan minimal pendidikan dasar di kabupaten/kota diperlukan “keterlibatan masyarakat karena masyarakat mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan. Keterlibatan masyarakat dalam program-program sektor pendidikan dapat dilaksanakan secara transparan,

akuntabel dan perbaikan secara terus-menerus”. Keterlibatan masyarakat yang diwadahi oleh komite sekolah mutlak dibutuhkan sebagai wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas pendidikan.

Semua peran komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dalam memberikan pertimbangan, dukungan, pengawasan, dan mediasi sangat dibutuhkan untuk mencapai standar pelayanan minimal sekolah dasar di kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dipaparkan dalam modul *United States Agency International Development* (2014:23) yang menyatakan bahwa strategi program pencapaian standar pelayanan minimal sekolah dasar di kabupaten/kota dilakukan melalui “penguatan organisasi masyarakat sipil, pemerintah kabupaten membuka ruang organisasi masyarakat sipil dengan melibatkan mereka dalam analisis, perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Selain itu, instansi pemerintah dan masyarakat sipil bekerjasama, berdialog, berdiskusi mencari solusi terbaik”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) tingkat partisipasi komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dalam memberikan pertimbangan adalah tinggi, (2) tingkat partisipasi komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dalam memberikan dukungan adalah tinggi, (3) tingkat partisipasi komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dalam memberikan pengawasan adalah tinggi, (4) tingkat partisipasi komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dalam memberikan mediasi adalah tinggi, (5) terdapat hubungan yang signifikan antara partisipasi komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dengan pemenuhan standar pelayanan minimal sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, (6) terdapat hubungan yang signifikan antara partisipasi komite sekolah dalam memberikan dukungan dengan pemenuhan standar pelayanan minimal sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, (7) terdapat hubungan yang signifikan antara partisipasi komite sekolah dalam memberikan pengawasan dengan pemenuhan standar pelayanan minimal sekolah dasar di Kecamatan

Kepanjen Kabupaten Malang, (8) terdapat hubungan yang signifikan antara partisipasi komite sekolah dalam memberikan mediasi dengan pemenuhan standar pelayanan minimal sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, (9) terdapat hubungan yang signifikan antara partisipasi komite sekolah dalam memberikan pertimbangan, partisipasi komite sekolah dalam memberikan dukungan, partisipasi komite sekolah dalam memberikan pengawasan, partisipasi komite sekolah dalam memberikan mediasi dengan pemenuhan standar pelayanan minimal sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang diberikan kepada beberapa pihak, yaitu (1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, agar lebih mengetahui tingkat partisipasi komite sekolah dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dalam menjalankan perannya sehingga dapat memberikan pengarahan dan motivasi kepada kepala sekolah di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang untuk semakin giat dalam melibatkan masyarakat dalam setiap program sekolah, (2) Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang sebagai pemegang kebijakan di sekolah diharapkan terus memberikan pengarahan kepada komite sekolah agar selalu mengoptimalkan peran dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) Pengurus Komite Sekolah agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya sebagai komite sekolah, (4) Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan melalui hasil penelitian yang dihasilkan dapat menjadi referensi dan sumber pengetahuan baru mengenai bidang kajian administrasi pendidikan, (5) Mahasiswa Jurusan Administrasi Pendidikan diharapkan sering melakukan riset mengenai bidang kajian administrasi pendidikan lainnya, (6) Peneliti Lain dapat mengembangkan hasil penelitian dengan menambahkan variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini seperti faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan standar pelayanan minimal sekolah dasar.

DAFTAR RUJUKAN

- CNN Indonesia. 2015. *Penerapan Standar Minimal Pendidikan Masih Kacau*, (Online), (<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150909150711-20-77646/penerapan-standar-pelayanan-minimal-pendidikan-masih-kacau/>), diakses 1 April 2016.
- Depdiknas. 2003. *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kompas. 2011. *88,8 Persen Sekolah di Bawah Standar*, (Online), (<http://entertainment.kompas.com/read/2011/03/23/10321298/88.8.Persen.Sekolah.di.Bawah.Standar>), diakses 1 April 2016.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.*
- United States Agency International Development (USAID). 2014. Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar Untuk Kabupaten/Kota.* Jakarta: USAID-KINERJA